

Sekuritisasi Transaksional dalam Krisis Venezuela: Analisis Politik dan Hukum Keamanan atas Penangkapan Nicolás Maduro

Sidratahta Mukhtar,¹ Laurencius Simanjuntak,² Aly Ashghor³

¹Universitas Kristen Indonesia, ^{2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ali.ashgar@ubharajaya.ac.id

Informasi Artikel:

Diterima:	Revisi:	Disetujui:	Diterbitkan:
7 April 2026	8 Juni 2026	11 Juni 2026	31 Juli 2026

Abstract : *This article examines the arrest of Venezuelan President Nicolás Maduro by the United States in January 2026 through the perspectives of security law and securitization theory. Although the operation was officially justified on the basis of narco-terrorism charges, the use of military force within the territory of a sovereign state raises significant questions concerning the principles of state sovereignty and international law. Employing a normative legal approach combined with the Copenhagen School's securitization theory, this study analyzes how Venezuela's strategic oil resources were discursively reconstructed as an existential threat to U.S. national security through the interaction of speech acts, audience acceptance, and political legitimization, thereby enabling the adoption of extraordinary measures. The findings indicate that the United States acted as the principal securitizing actor, portraying the Maduro regime as a national security threat while simultaneously advancing strategic interests related to energy security and access to Venezuela's oil resources. Building upon these findings, this article introduces the concept of transactional securitization, which explains how security discourse may function not only to legitimize exceptional security measures but also to facilitate strategic economic objectives. This conceptual development extends the explanatory scope of*



Copyright © (2026) Sidratahta Mukhtar, Laurencius Simanjuntak, Aly Ashghor. Jurnal Keamanan Nasional. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.

classical securitization theory by demonstrating that successful securitization may be followed by the political and economic reconfiguration of strategically valuable natural resources. From the perspective of international law, the Maduro case raises important questions concerning the principles of Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) and good faith in the exercise of state authority, while illustrating the increasingly blurred boundary between national security and geopolitical economic competition.

Keywords : *transactional securitization; securitization; security law; Venezuela; state sovereignty*

Abstrak : *Studi ini melakukan penelaahan mendalam terhadap peristiwa penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh otoritas Amerika Serikat pada Januari 2026 melalui kacamata hukum keamanan serta teori sekuritisasi. Kendati operasi tersebut secara formalitas bersandar pada dakwaan narco-terrorism, penggerakan kekuatan militer di dalam teritorial negara berdaulat memicu polemik substansial mengenai prinsip kedaulatan serta norma hukum internasional. Dengan mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif yang diintegrasikan dengan kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School, artikel ini menguraikan bagaimana sumber daya minyak strategis Venezuela dikonstruksikan secara diskursif sebagai ancaman eksistensial bagi stabilitas nasional Amerika Serikat melalui mekanisme speech act, akseptasi audiens, dan legitimasi politik yang memungkinkan adopsi kebijakan luar biasa (extraordinary measures). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Amerika Serikat memosisikan diri sebagai aktor sekuritisasi (securitizing actor) utama dengan membingkai rezim Maduro sebagai ancaman keamanan sembari mengamankan kepentingan energi nasional. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengonseptualisasikan istilah 'sekuritisasi transaksional' (transactional securitization), yakni utilisasi narasi keamanan tidak sekadar untuk legitimasi tindakan represif, melainkan juga guna mengamankan akses terhadap komoditas ekonomi strategis. Secara teoretis, konsep ini memperluas daya jangkauan teori sekuritisasi klasik dengan mengeksplorasi bagaimana keberhasilan sekuritisasi berujung pada rekonfigurasi penguasaan sumber daya alam. Dalam perspektif hukum internasional, fenomena ini menggugat relevansi prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) serta asas itikad baik (good faith) dalam relasi antarnegara.*

Kata kunci : *sekuritisasi, hukum keamanan, Venezuela, kedaulatan*

PENDAHULUAN

Lanskap geopolitik global mengalami guncangan signifikan pada awal Januari 2026 pasca-operasi militer terbatas Amerika Serikat di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Operasi presisi yang melibatkan unit pasukan khusus AS tersebut mengekstraksi Maduro ke wilayah yurisdiksi Amerika Serikat guna menghadapi proses peradilan di pengadilan federal New York. Washington mengonstruksikan diskursus bahwa tindakan tersebut merupakan manifestasi penegakan hukum terhadap tindak pidana transnasional, khususnya tuduhan *narco-terrorism* serta keterlibatan dalam sindikat narkoba internasional yang diduga berkelindan dengan elite pemerintahan di Caracas.¹

Secara yuridis, tindakan ekstrateritorial ini berpijak pada dakwaan Departemen Kehakiman AS tahun 2020 yang menuduh Maduro berkolaborasi dengan jaringan kriminal transnasional, termasuk kelompok bersenjata FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*). Tuduhan tersebut mencakup konspirasi sistematis untuk 'membanjiri' pasar domestik AS dengan kokain sebagai instrumen strategi kriminal. Atas dasar inilah, Washington mengklaim legitimasi penangkapan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana global, meskipun operasi tersebut dilakukan tanpa izin dari negara berdaulat yang bersangkutan.

Urgensi pemberantasan narkoba ini diperkuat oleh data resmi dari U.S. Customs and Border Protection (CBP) menunjukkan bahwa pada Tahun Fiskal 2024 aparat berhasil menyita lebih dari 27.000 pon (sekitar 12,2 ton) fentanil, puluhan ribu pon metamfetamin dan kokain, serta sejumlah heroin yang diselundupkan terutama melalui perbatasan Amerika Serikat–Meksiko. Besarnya jumlah narkoba yang berhasil disita tersebut mengindikasikan bahwa jaringan perdagangan narkoba transnasional masih menjadikan pasar Amerika Serikat sebagai tujuan utama distribusi, mengingat angka penyitaan hanya merepresentasikan sebagian dari keseluruhan narkoba yang berupaya masuk ke wilayah negara tersebut. Menurut penilaian lembaga penegak hukum AS,

¹ Lauren Floyd, "Maduro Indictment Unsealed after U.S. Capture in Venezuela," *Axios*, January 3, 2026, <https://www.axios.com/2026/01/03/indictment-trump-maduro-capture-venezuela> (diakses 6 Januari, 2026.)

sebagian besar fentanil yang beredar di pasar domestik berasal dari organisasi kriminal transnasional di Meksiko yang diselundupkan melalui pelabuhan masuk resmi. Oleh karena itu, pengawasan perbatasan menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya menekan peredaran narkoba ilegal di negara tersebut.²

Namun demikian, tindakan penangkapan terhadap Maduro dalam perspektif hukum keamanan dan hukum internasional dinilai penuh kontroversi serius karena melampaui batas yurisdiksi domestik dan berpotensi melanggar prinsip fundamental kedaulatan negara. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas menekankan larangan intervensi terhadap integritas teritorial dan kedaulatan politik suatu negara. Sejumlah analis bahkan menilai operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan bentuk intervensi militer yang menyerupai upaya perubahan rezim (*regime change*) dengan justifikasi hukum sebagai pembungkusunya. Dengan demikian, peristiwa ini menandai preseden baru dalam praktik hubungan internasional, di mana batas antara penegakan hukum global dan intervensi kedaulatan menjadi semakin kabur.

Ketegangan yang memuncak dalam peristiwa tersebut sejatinya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada dinamika konflik geopolitik yang telah berlangsung lama antara Republik Bolivariana Venezuela dan Amerika Serikat. Sejak era kepemimpinan Hugo Chávez hingga berlanjut pada Nicolás Maduro, orientasi ideologi sosialis yang diusung rezim Caracas telah mendorong kebijakan nasionalisasi sektor energi, khususnya minyak, yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan Barat. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan upaya kedaulatan ekonomi, tetapi juga secara langsung mengonfrontasi antang kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan.

Dalam konteks tersebut, Venezuela menjelma menjadi aktor kunci dalam pasar energi global sekaligus titik friksi utama dalam hubungan bilateral kedua negara. Nasionalisasi aset energi dan pembatasan terhadap perusahaan asing memperdalam jurang ketegangan, karena bertentangan dengan kepentingan

² U.S. Customs and Border Protection, "Frontline Against Fentanyl," accessed August 7, 2026, <https://www.cbp.gov/border-security/frontline-against-fentanyl>

ekonomi dan paradigma liberal yang dianut Washington.³ Dengan demikian, konflik antara kedua negara tidak semata persoalan hukum atau politik kontemporer, melainkan merupakan manifestasi dari benturan ideologi, kepentingan ekonomi, dan perebutan pengaruh geopolitik yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Dalam kerangka tersebut, dimensi ekonomi—khususnya sektor energi—menjadi faktor kunci yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik yang terjadi. Hal ini tercermin dari besarnya potensi sumber daya minyak Venezuela yang, berdasarkan berbagai studi energi internasional, diperkirakan mencapai lebih dari 303 miliar barel dan menjadikannya sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi.⁴

Skala cadangan ini menempatkan Venezuela pada posisi strategis dalam peta energi global sekaligus meningkatkan nilai geopolitiknya di tengah persaingan kekuatan besar. Lebih jauh, kekayaan energi tersebut sebagian besar terkonsentrasi di kawasan Sabuk Minyak Orinoco (*Orinoco Oil Belt*), salah satu wilayah dengan deposit minyak mentah ekstra berat terbesar di dunia.⁵

Karakteristik minyak yang berat dan kompleks memang menghadirkan tantangan teknis dalam eksploitasi. Sekalipun demikian, tetap menjadikannya sebagai aset strategis jangka panjang yang memiliki daya tarik tinggi bagi kepentingan industri energi global. Jadi, keberlimpahan sumber daya ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi ekonomi domestik Venezuela, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam politik luar negeri dan arena kontestasi geopolitik. Dalam konteks ini, penguasaan dan akses terhadap sumber daya energi Venezuela dapat dipahami sebagai salah satu variabel yang mampu merasionalisasi intensitas keterlibatan dan kepentingan negara-negara besar, khususnya AS, dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut.

³ Azza Bimantara, "AS vs Venezuela, Akademisi UMM: Konflik Geopolitik Kepentingan Ekonomi dan Energi," *Universitas Muhammadiyah Malang*, January 19, 2026, <https://umm.ac.id/as-vs-venezuela-akademisi-umm-konflik-geopolitik-kepentingan-ekonomi-dan-energi/>

⁴ Worldometer, "Minyak Venezuela," <https://www.worldometers.info/id/minyak/minyak-venezuela/>, diakses February 7, 2026.

⁵ Bernard Mommer, "The Value of Extra-Heavy Crude Oil from the Orinoco Belt," *Middle East Economic Survey*, 47, no. 11 (March 15, 2004).

Sidratahta Mukhtar, Laurencius Simanjuntak, Aly Ashghor

Implikasi strategis dari besarnya cadangan energi tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan posisi tawar Venezuela dalam sistem energi global, tetapi juga melahirkan paradoks struktural yang kompleks. Di satu sisi, ketergantungan global terhadap energi fosil memposisikan Venezuela sebagai aktor yang sangat strategis dalam percaturan geopolitik internasional. Namun di sisi lain, kelimpahan sumber daya ini justru sering dikaitkan dengan fenomena *resource curse*, di mana kekayaan alam tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi.

Akibatnya, hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat mengalami degradasi yang tajam, terutama setelah nasionalisasi aset perusahaan energi raksasa seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips yang menolak tunduk pada skema kepemilikan baru. Langkah tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi domestik, melainkan juga ditafsirkan sebagai tantangan langsung terhadap hegemoni ekonomi Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.⁶

Dalam konteks historis hubungan energi bilateral, Venezuela pernah menempati posisi strategis sebagai salah satu pemasok utama minyak mentah bagi kilang-kilang di pesisir Teluk Amerika. Kedekatan geografis serta kompatibilitas jenis minyak mentah berat Venezuela dengan infrastruktur kilang AS menjadikan hubungan energi kedua negara bersifat saling ketergantungan. Namun, perubahan orientasi politik di Caracas yang semakin konfrontatif terhadap hegemoni Washington secara bertahap menggeser hubungan tersebut ke arah rivalitas terbuka, terutama setelah pemerintah Venezuela mengadopsi kebijakan ekonomi yang menekankan kedaulatan sumber daya dan resistensi terhadap pengaruh eksternal.

Sebagai respons, AS kemudian menerapkan serangkaian sanksi ekonomi yang secara langsung menargetkan sektor energi Venezuela, khususnya terhadap *Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)* sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sanksi ini tidak hanya membatasi akses Venezuela terhadap pasar ekspor utama, tetapi juga menghambat kemampuan perusahaan untuk

⁶ Fathur Octaviano Iskandar, "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Krisis Venezuela pada Masa Nicolas Maduro," *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 9, No. 2 (2021), hal. 445.

memperoleh teknologi, investasi, dan pembiayaan internasional.⁷ Sekalipun demikian, di balik kontraksi produksi tersebut, potensi cadangan minyak Venezuela yang sangat besar tetap menjadi faktor strategis dalam kalkulasi energi global. Dengan cadangan yang mencapai ratusan miliar barel, Venezuela tetap memiliki daya tarik signifikan bagi kepentingan energi jangka panjang, termasuk bagi AS sendiri. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Eurasia dan Timur Tengah, yang mendorong negara-negara besar untuk mengamankan sumber energi alternatif.

Memasuki tahun 2026, ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik puncak melalui sebuah peristiwa luar biasa yang menggabungkan dimensi hukum dan militer, yakni penangkapan Presiden Nicolás Maduro dalam operasi yang didukung otoritas AS di Caracas. Tindakan ini secara resmi didasarkan pada tuduhan keterlibatan dalam jaringan narco-terrorism internasional dan diposisikan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana transnasional yang bertujuan memberantas peredaran narkotika yang mengancam keamanan domestik Amerika Serikat.

Langkah tersebut segera memicu kontroversi luas karena dinilai melampaui yurisdiksi hukum nasional dan berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam perspektif hukum keamanan, penangkapan seorang kepala negara aktif di wilayah kedaulatannya sendiri merupakan tindakan yang melampaui batas-batas yurisdiksi yang lazim. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa narasi kriminalitas hanyalah sebuah instrumen untuk mencapai tujuan lain yang bersifat eksistensial bagi negara penindak. Di sinilah relevansi penggunaan analisis sekuritisasi menjadi penting.

Dalam teori keamanan kontemporer, sekuritisasi yang diperkenalkan oleh Copenhagen School menjelaskan keamanan bukanlah sesuatu yang objektif, melainkan hasil dari konstruksi sosial melalui ‘tindakan tutur’ (*speech act*).⁸ Dalam

⁷ Faradilla Firdaus, "Strategi Perlawanan Venezuela dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat," *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 12, No. 1 (2019), hal. 88.

⁸ Barry Buzan, et al., *Security: A New Framework for Analysis*, (London: Lynne Rienner Publishers, 1998), dikutip dalam Budiman, I., "Teori Sekuritisasi dalam Studi Keamanan Nasional," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 9, No. 2 (2013).
Sidratahta Mukhtar, Laurencius Simanjuntak, Aly Ashghor

konteks kasus ini, pemerintah AS secara sistematis telah membangun narasi bahwa rezim Maduro adalah ‘ancaman luar biasa bagi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS’. Dengan melabeli Maduro sebagai ‘gembong narkoba’, AS seperti terlihat ingin memindahkan isu persaingan energi dari ranah isu geopolitik normal ke ranah isu keamanan.

Penangkapan Maduro di tahun 2026 ini tidak dapat dipandang hanya sebagai isu kriminalitas narkoba biasa. Terdapat anomali hukum di mana instrumen hukum domestik sebuah negara (baca: AS) digunakan untuk mengeksekusi kepala negara aktif di wilayah kedaulatannya sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya proses sekuritisasi, di mana isu ekonomi (pasokan energi) dan politik didefinisikan ulang sebagai ancaman keamanan nasional yang eksistensial bagi AS untuk membenarkan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*).

Hipotesis bahwa penangkapan ini merupakan bentuk sekuritisasi demi kepentingan ekonomi mendapatkan pembenaran melalui pernyataan resmi Presiden Donald Trump sesaat setelah operasi penangkapan Maduro dinyatakan berhasil. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump tidak hanya menekankan pada aspek keberhasilan pemberantasan narkoba, tetapi secara eksplisit menghubungkan tindakan militer tersebut dengan masa depan komoditas energi di negara tersebut. Trump menyatakan:

*"We're going to have our very large United States oil companies... go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country... The future will be determined by the ability to protect commerce and territory and resources that are core to national security. These are core to our national security."*⁹

(Kita akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat kita... untuk masuk, membelanjakan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan uang bagi

⁹ Donald Trump, "TRANSCRIPT: President Trump Discusses the Capture of Nicolás Maduro in Venezuela, 1.03.26," Senate Democratic Leadership, Newsroom, January 3, 2026, <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-discusses-the-capture-of-nicolas-maduro-in-venezuela-10326>.

negara... Masa depan akan ditentukan oleh kemampuan untuk melindungi perdagangan, wilayah, serta sumber daya yang merupakan inti dari keamanan nasional. Hal-hal ini adalah inti dari keamanan nasional kita.)

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas tentang bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh AS dalam mengubah isu ekonomi (minyak) menjadi isu keamanan nasional melalui narasi narco-terrorism terhadap Nicolás Maduro?

Naskah paper ini akan mengeksplorasi bagaimana kepentingan ekonomi yang sangat besar terhadap minyak Venezuela telah memicu pemerintah AS untuk membangun konstruksi ancaman yang sedemikian rupa, sehingga tindakan unilateral terhadap Nicolás Maduro diklaim sebagai langkah yang ‘perlu dan sah’ demi keamanan nasional. Oleh karena itu, makalah ini tidak akan melihat kasus penangkapan Maduro sebagai peristiwa pidana, melainkan sebagai bentuk manifestasi dari sekuritisasi energi.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep sekuritisasi dalam studi keamanan, khususnya teori sekuritisasi dari Copenhagen School yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver, guna menjelaskan bagaimana suatu isu ekonomi dapat dikonstruksi menjadi ancaman keamanan nasional melalui speech act, penerimaan audiens, dan legitimasi politik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada Januari 2026 sebagai objek analisis, dengan menempatkannya dalam kerangka hukum internasional, hukum keamanan, serta prinsip kedaulatan negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Majelis Umum PBB tentang *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, serta dokumen resmi dan pernyataan pemerintah terkait operasi penangkapan tersebut. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal hukum, literatur hubungan internasional, dan tulisan ilmiah yang membahas teori sekuritisasi, hukum keamanan, dan konflik Venezuela–Amerika Serikat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan teori keamanan untuk menemukan pola sekuritisasi yang menunjukkan adanya penggunaan narasi keamanan

sebagai legitimasi tindakan luar biasa, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya kecenderungan transactional securitization dalam kebijakan keamanan Amerika Serikat.

TEORI SEKURITISASI

Untuk membedah secara mendalam kasus penangkapan Nicolás Maduro dari perspektif hukum keamanan, diperlukan kerangka teoritis yang mampu mengungkap motif di balik tindakan hukum formal. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui lensa hukum pidana internasional konvensional, mengingat adanya diskrepansi antara tuduhan narco-terrorism dengan realitas kepentingan energi yang menyertainya. Teori sekuritisasi yang digagas oleh Copenhagen School memberikan alat analisis kritis untuk memahami bagaimana sebuah isu ekonomi, dalam hal ini penguasaan minyak, secara sengaja digeser menjadi isu keamanan nasional yang mendesak. Dalam hal ini, sekuritisasi dalam studi keamanan merujuk pada proses di mana isu atau subjek tertentu diperlakukan sebagai masalah keamanan.¹⁰

Proses sekuritisasi ini bekerja melalui mekanisme konstruksi narasi yang sistematis, di mana hukum bukan lagi dipandang sebagai sekumpulan norma statis, melainkan sebagai instrumen fleksibel yang digunakan oleh aktor kekuasaan untuk membenarkan tindakan-tindakan luar biasa (*extraordinary measures*). Dalam konteks intervensi AS terhadap Venezuela, hukum keamanan nasional diaktifkan untuk melompati batas-batas kedaulatan negara lain yang biasanya dilindungi secara ketat oleh hukum internasional.

Agar sebuah isu dapat dianggap berhasil ‘disekuritisasi’ dan mendapatkan legitimasi publik, terdapat lima elemen kunci atau unsur konstitutif yang harus terpenuhi secara simultan. Kelima unsur ini saling berkaitan untuk membentuk sebuah jaring pembenaran politik dan hukum, yakni: 1) Aktor Sekuritisasi (*Securitizing Actor*); 2) Objek yang Dirujuk (*Referent Object*); 3) Tindakan Tutar

¹⁰ Barry Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde, *Security: A New Framework For Analysis* (London: Lynne Rienner Publishers, 1998)

(*Speech Act*); 4) Penerimaan Audiens (*Audience Acceptance*); dan 5) Tindakan Luar Biasa (*Extraordinary Measures*).¹¹

Kelima unsur tersebut membentuk sebuah proses linear yang mengubah status Venezuela dari sekadar mitra dagang atau rival politik menjadi ancaman keamanan global yang seolah harus 'dinetralisir'. Penjelasan berikut akan menguraikan bagaimana masing-masing unsur tersebut bekerja secara spesifik dalam kasus penangkapan Nicolás Maduro demi penguasaan kembali aset minyak di kawasan Amerika Latin:

1. *Securitizing Actor* (Aktor Sekuritisasi)

Aktor sekuritisasi adalah entitas yang melakukan tindakan tutur (*speech act*) untuk mendeklarasikan adanya ancaman eksistensial terhadap objek yang dilindungi. Dalam kasus ini, Pemerintah AS, khususnya melalui Departemen Kehakiman dan figur Presiden Donald Trump, bertindak sebagai aktor utama. Mereka memegang otoritas legal dan politik untuk memberikan label ancaman terhadap pihak lain demi melegitimasi penggunaan kekuatan militer di luar batas domestik mereka.¹²

2. *Referent Object* (Objek yang Dirujuk)

Referent object adalah sesuatu yang diklaim sedang terancam secara eksistensial dan harus dilindungi. Secara formal, AS mengeklaim bahwa keamanan masyarakat Amerika (dari bahaya narkoba) dan stabilitas demokrasi Kawasan adalah objek yang dilindungi. Namun, jika dibedah melalui kacamata ekonomi politik (bukan keamanan), *referent object* yang sesungguhnya adalah akses terhadap cadangan minyak Venezuela. Ketidakmampuan pasar global mengakses minyak Venezuela akibat kebijakan nasionalisasi Maduro diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas energi dan ekonomi Barat.

¹¹ Imam Budiman, "Teori Sekuritisasi dalam Studi Keamanan Nasional," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur*, Vol. 9, No. 2 (2013), hal. 12. (Membahas mengenai integrasi elemen-elemen sekuritisasi dalam kebijakan luar negeri).

¹² Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 40.

3. *Speech Act* (Tindak Tutur)

Speech act adalah narasi atau pernyataan bahwa suatu isu merupakan ancaman keamanan eksistensial. Pernyataan Presiden Trump pada 3 Januari 2026 merupakan bentuk speech act yang sempurna. Dengan melabeli Maduro sebagai "diktator tidak sah" (*illegitimate dictator*) dan menuduh rezimnya melakukan "pencurian properti Amerika terbesar" atas infrastruktur minyak, Trump secara efektif memindahkan isu ekonomi dan hukum internasional ke ranah ancaman keamanan nasional. Tindakan tutur ini berfungsi untuk mendiskreditkan status kedaulatan Maduro dan melegitimasi tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) militer AS sebagai target operasi penegakan hukum.¹³

4. *Audience Acceptance* (Penerimaan Audiens)

Sekuritisasi tidak bersifat sepihak, ia hanya berhasil jika audiens strategis (seperti Kongres AS, publik domestik, atau sekutu internasional) menerima narasi ancaman tersebut. Dalam kasus ini, label narco-terrorism sengaja dipilih karena memiliki sensitivitas politik yang tinggi bagi publik Amerika. Penerimaan dari audiens inilah yang akhirnya memberikan mandat politik tidak tertulis bagi pemerintah AS untuk mengeksekusi tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) yang melangkahi hukum internasional, yaitu mengabaikan kedaulatan wilayah Venezuela demi klaim 'perang melawan narkoba'.¹⁴

¹³ Donald Trump, "TRANSCRIPT: President Trump Discusses the Capture of Nicolás Maduro in Venezuela, 1.03.26," Senate Democratic Leadership, Newsroom, January 3, 2026, <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-discusses-the-capture-of-nicolas-maduro-in-venezuela-10326>.

¹⁴ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 25. Lihat juga Thierry Balzacq, "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context," *European Journal of International Relations* 11, no. 2 (2005): 171–201.

5. *Extraordinary Measures* (Tindakan Luar Biasa)

Unsur terakhir adalah penggunaan langkah-langkah di luar prosedur hukum normal. Penangkapan Maduro melalui operasi militer unilateral di Caracas adalah manifestasi dari *extraordinary measures*. Dalam kondisi politik normal, sengketa antarnegara diselesaikan melalui diplomasi atau Mahkamah Internasional. Amerika Serikat melalui sekuritisasi merasa berhak mengesampingkan prinsip imunitas kepala negara aktif (*immunity ratione personae*) dan memaksakan yurisdiksi ekstrateritorial secara unilateral. Tindakan pemaksaan lintas batas (*coercive measures*) tanpa mandat Dewan Keamanan PBB atau persetujuan negara yang bersangkutan dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip kedaulatan dan larangan penggunaan kekerasan dalam hukum internasional.¹⁵

Dalam proses sekuritisasi, ada tiga komponen yang perlu dilakukan dalam proses sekuritisasi sehingga wacana keamanan dapat bergema di masyarakat. Proses ini mengubah isu tertentu menjadi masalah keamanan, yang memungkinkan penggunaan langkah-langkah luar biasa untuk menanganinya yaitu: yaitu ancaman eksistensial (*existential threat*), langkah darurat (*emergency action*), dan pelanggaran aturan (*breaking free of rules*).¹⁶

Dengan demikian, sekuritisasi dapat dipahami sebagai suatu kebijakan keamanan yang sangat erat kaitannya dengan proses politik yang kuat. Melalui mekanisme sekuritisasi, suatu isu yang semula dipandang sebagai persoalan politik, ekonomi, atau sosial biasa dapat direkonstruksi menjadi persoalan keamanan yang dianggap mendesak, sehingga memerlukan respons luar biasa atau tindakan darurat dalam penanganannya, seperti pada kasus terorisme

¹⁵ Iain Cameron, "International Criminal Jurisdiction, Protective Principle," dalam Max Planck Encyclopedia of Public International Law, terakhir diperbarui Oktober 2021, Max Planck Encyclopedias of International Law, <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1902>. Lihat juga Ani Purwati, "Extraterritorial Jurisdiction and Head-of-State Immunity: Sovereignty and the Use of Force in the Fragmentation of International Law," *International Journal of Science and Environment* 4, no. 1 (2026): 334-42. <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.330>.

¹⁶ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 26.

maupun pandemi. Proses tersebut sekaligus memberikan otoritas dan legitimasi kepada aktor yang melakukan sekuritisasi—umumnya pemerintah—untuk mengambil langkah-langkah tegas. Namun demikian, kewenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Proses sekuritisasi bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi secara instan, melainkan sebuah proses komunikasi dan tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan sebuah isu dari koridor politik normal ke dalam ruang lingkup 'keadaan darurat'. Dalam kasus Venezuela, AS melakukan transformasi isu melalui proses yang sangat terstruktur. Hal ini dilakukan karena dalam tata hukum internasional, penguasaan minyak negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan ekonomi, namun penindakan terhadap terorisme dan narkoba dipandang sebagai kewajiban moral global (*erga omnes*).

Oleh karena itu, AS harus melakukan rekonstruksi realitas (baca: sekuritisasi) terhadap krisis Venezuela: dari sebuah sengketa nasionalisasi aset menjadi ancaman terhadap keselamatan publik warga Amerika. Proses sekuritisasi Amerika Serikat dalam konteks penangkapan Maduro dapat dibagi ke dalam tiga tahap krusial yang saling berkelanjutan:

Pertama, Tahap Pre-Sekuritisasi: Politisasi Isu Ekonomi (2015–2024).

Awalnya, isu minyak Venezuela berada dalam ranah 'politik normal'. Perselisihan AS-Venezuela dikelola melalui diplomasi, sanksi ekonomi sepihak, serta gugatan arbitrase internasional terkait nasionalisasi aset ExxonMobil dan ConocoPhillips. Pada fase ini, minyak masih dipandang sebatas komoditas ekonomi dan alat tawar politik. Namun, kegagalan sanksi dalam menggulingkan rezim Maduro—ditambah urgensi pasokan energi jangka panjang pasca-konflik global—memaksa aktor sekuritisasi mengambil langkah ekstrem di luar jalur konvensional.¹⁷

¹⁷ Michael C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics," *International Studies Quarterly* 47, no. 4 (2003): 515.

Dinamika tersebut mulai berubah ketika sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap pemerintahan Nicolás Maduro gagal mencapai tujuan politiknya, yaitu perubahan rezim. Sejak 2017 hingga 2019, Washington menjatuhkan serangkaian sanksi finansial dan energi terhadap perusahaan minyak negara, *Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)*, yang secara efektif membatasi perdagangan minyak Venezuela di pasar internasional.

Kebijakan tersebut memperparah keterpurukan industri minyak domestik yang sebelumnya sudah mengalami penurunan produksi akibat salah kelola, minimnya investasi, dan isolasi ekonomi.¹⁸ Dalam kerangka hubungan internasional, kegagalan strategi tekanan ekonomi ini mengubah cara pandang terhadap minyak Venezuela—dari sekadar komoditas ekonomi menjadi elemen krusial bagi stabilitas geopolitik dan keamanan energi global.

Di tengah ketidakpastian global, kebutuhan akan kepastian pasokan energi jangka panjang mempercepat proses sekuritisasi (penggeseran isu menjadi ancaman keamanan) minyak Venezuela. Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia—sekitar 303 miliar barel—Venezuela memiliki posisi strategis yang membuat kontrol atas sumber dayanya menjadi kepentingan geopolitik signifikan bagi aktor eksternal.¹⁹

Ketika jalur diplomasi, sanksi, dan arbitrase internasional dinilai tidak lagi efektif, isu minyak Venezuela mulai dipresentasikan sebagai persoalan keamanan strategis yang membutuhkan tindakan di luar mekanisme konvensional. Dalam perspektif teori sekuritisasi, transformasi ini menandai pergeseran isu dari ranah "politik normal" menuju "politik darurat", memberikan legitimasi bagi aktor negara untuk mengambil langkah ekstrem demi melindungi kepentingan energi dan keamanan nasionalnya.

¹⁸ The Straits Times, "How Venezuelan oil factored into the US capture of Maduro," (4 Januari 2026), <https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/how-venezuelan-oil-factored-into-the-us-seizure-of-maduro>

¹⁹ Mucahithan Avcioglu, "Global energy giants gunning for Venezuela's resources," Anadolu Ajansı, (7 Januari 2026), <https://www.aa.com.tr/en/economy/explainer-global-energy-giants-gunning-for-venezuela-s-resources/3792648?>

Sidratahta Mukhtar, Laurencius Simanjuntak, Aly Ashghor

Kedua, Tahap Speech Act: Konstruksi Narasi Narco-Terrorism (2025)

Tahap ini merupakan titik balik sekuritisasi minyak Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat selaku aktor sekuritisasi mulai memproduksi narasi masif yang menggeser citra Venezuela dari negara salah kelola ekonomi menjadi sebuah narco-state yang terlibat dalam jaringan kriminal transnasional. Melalui produksi wacana politik dan hukum yang intensif, fokus perdebatan mengenai minyak secara bertahap dipindahkan dari ranah ekonomi ke ranah keamanan nasional, sementara isu energi itu sendiri disembunyikan di balik narasi kemanusiaan dan keamanan publik. Dalam kerangka teori sekuritisasi Ole Wæver dan Barry Buzan, proses ini dipahami sebagai speech act, yaitu upaya aktor politik mendefinisikan suatu isu sebagai ancaman eksistensial guna melegitimasi respons keamanan yang luar biasa.²⁰

Urgensi tindakan ini diperkuat ketika AS meluncurkan dakwaan resmi (*indictment*) yang menuduh Nicolás Maduro memimpin kartel narkoba untuk mendistribusikan kokain secara masif ke wilayah Amerika.²¹ Dakwaan tersebut juga mengungkapkan keterlibatan jaringan kriminal internasional serta pemanfaatan institusi negara Venezuela untuk melindungi operasi perdagangan narkoba, yang oleh para pengamat dinilai sebagai instrumen diskursif untuk mendelegitimasi rezim secara politik.²²

Minyak tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas strategis, melainkan didefinisikan sebagai sumber pendanaan utama bagi aktivitas narkoterorisme. Akibatnya, penguasaan dan intervensi atas sektor energi Venezuela dikonstruksikan sebagai langkah rasional serta sah demi memutus

²⁰ Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J., *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner. (1998)

²¹ U.S. Department of Justice, "Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current And Former Venezuelan Officials, And FARC Leadership," Press Release, 26 Maret 2020, <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-narco-terrorism-charges-against-nicolas-maduro-current>.

²² Fathur Octaviano Iskandar, "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Krisis Venezuela pada Masa Nicolas Maduro," *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2021): 455.

rantai pendanaan kriminal sekaligus melindungi keamanan domestik AS. Redefinisi melalui proses diskursif dan institusional ini menunjukkan bagaimana sebuah isu ekonomi dapat ditransformasikan menjadi ancaman keamanan guna membuka legitimasi bagi tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dalam politik internasional.

Ketiga, Tahap Eskalasi dan Tindakan Luar Biasa (Extraordinary Measures) (2026)

Proses sekuritisasi tersebut mencapai puncaknya pada Januari 2026, ketika Amerika Serikat melancarkan operasi militer terbatas di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan pemindahannya ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba. Operasi yang berlangsung pada 3 Januari 2026 itu melibatkan serangan militer berskala besar dan penangkapan langsung terhadap kepala negara yang sedang menjabat—sebuah tindakan yang jarang terjadi dalam praktik hubungan internasional modern.²³

Penangkapan tersebut menandai eskalasi signifikan dari kebijakan tekanan ekonomi dan hukum yang sebelumnya ditempuh Washington, sekaligus menunjukkan bahwa isu Venezuela telah sepenuhnya diposisikan sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam kerangka teori sekuritisasi Barry Buzan dan Ole Wæver, kondisi ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi telah berhasil karena audiens—baik publik domestik Amerika Serikat maupun sebagian sekutu internasional—menerima narasi bahwa rezim Maduro merupakan ancaman transnasional melalui jaringan narkoba dan kriminal terorganisir.

Keberhasilan sekuritisasi tersebut kemudian memberikan legitimasi politik bagi penggunaan *extraordinary measures*, yakni tindakan yang berada di luar praktik politik normal. Dalam kasus ini, tindakan tersebut mencakup intervensi militer terbatas di wilayah negara lain serta pengabaian prinsip imunitas kepala negara (*head-of-state immunity*) yang secara tradisional dilindungi oleh hukum internasional. Beberapa pakar hukum internasional

²³ Regina Garcia Cano dan Konstantin Toropin, "US strikes Venezuela, says Nicolás Maduro has been captured," *Military Times*, 3 Januari 2026, <https://www.militarytimes.com/news/your-military/2026/01/03/us-strikes-venezuela-says-nicolas-maduro-has-been-captured/>.

bahkan mempertanyakan legalitas operasi tersebut karena penegakan hukum suatu negara pada wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah setempat dianggap melanggar prinsip kedaulatan negara.²⁴ Namun, dalam logika sekuritisasi, tindakan luar biasa tersebut dapat memperoleh legitimasi apabila isu yang dibingkai dianggap sebagai ancaman eksistensial yang mendesak, seperti narasi tentang *narco-terrorism* dan ancaman perdagangan narkoba lintas negara.

Pernyataan Presiden Donald Trump setelah operasi penangkapan tersebut semakin memperlihatkan tujuan akhir dari proses sekuritisasi tersebut. Dalam konferensi pers resminya, pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa Washington akan mengawasi proses transisi politik dan mengerahkan perusahaan minyak raksasa AS untuk mengambil alih serta memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang rusak.²⁵ Rencana pemulihan komersial dan kontrol atas sumber daya alam ini secara eksplisit disebut Trump sebagai "inti dari keamanan nasional" Amerika Serikat.²⁶

Konfirmasi tersebut menunjukkan bahwa setelah hambatan politik utama—yakni rezim Maduro—dihilangkan melalui justifikasi keamanan, isu minyak yang sebelumnya disembunyikan di balik narasi ancaman kembali diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan aktor sekuritisasi. Dengan demikian, isu minyak yang sebelumnya direpresentasikan sebagai sumber ancaman keamanan kembali diposisikan sebagai komoditas ekonomi, tetapi kali ini dalam kerangka politik dan ekonomi yang lebih sesuai dengan kepentingan aktor sekuritisasi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sekuritisasi dapat berfungsi sebagai mekanisme

²⁴ Ali Harb, "Abduction of Venezuela's Maduro illegal despite US charges, experts say," Al Jazeera, 8 Januari 2026, <https://www.aljazeera.com/news/2026/1/8/abduction-of-venezuelas-maduro-illegal-despite-us-charges-experts-say>.

²⁵ Donald Trump, "TRANSCRIPT: President Trump Discusses the Capture of Nicolás Maduro in Venezuela, 1.03.26," Senate Democratic Leadership, Newsroom, January 3, 2026, <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-discusses-the-capture-of-nicolas-maduro-in-venezuela-10326>.

²⁶ Trump, "Transcript: Capture of Nicolás Maduro." (Catatan Kaki Singkat)

politik untuk mengubah struktur kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya strategis di tingkat global.

Anomali Transactional Securitization dalam Kebijakan Keamanan AS

Dalam literatur klasik Copenhagen School, keberhasilan sebuah proses sekuritisasi sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk menjaga narasi ancaman agar tetap ‘murni’ secara moral. Isu ekonomi biasanya diletakkan sebagai dampak sekunder yang tidak direncanakan (*collateral benefit*), bukan sebagai motivasi utama yang diakui secara terbuka. Namun, penangkapan Maduro pada awal tahun 2026 oleh AS menghadirkan anomali teoretis yang sangat tajam, yang dapat disebut sebagai Sekuritisasi Transaksional (*Transactional Securitization*).

Konsep ini merujuk pada praktik di mana seorang aktor penyekuritisasi (dalam hal ini, Presiden Donald Trump) secara eksplisit dan transparan menghubungkan penggunaan instrumen keamanan nasional dengan keuntungan ekonomi material yang nyata. Trump tidak lagi memandang sekuritisasi sebagai cara untuk mendapatkan legitimasi normatif, melainkan sebagai mekanisme pasar politik di mana ‘biaya keamanan’ yang dikeluarkan harus menghasilkan ‘keuntungan komersial’ yang setimpal.²⁷

Fenomena *transactional securitization* ini mengubah sifat dasar hukum keamanan dari yang bersifat protektif menjadi bersifat ekstraktif. Dalam perspektif hukum internasional, terdapat prinsip good faith (itikad baik) yang menuntut bahwa penggunaan wewenang oleh suatu negara harus benar-benar ditujukan untuk maksud yang dinyatakan secara formal. Ketika Trump secara terbuka memerintahkan perusahaan minyak raksasa AS untuk masuk mengelola ladang minyak Venezuela dan menghasilkan uang bagi negaranya sesaat setelah

²⁷ Rita Abrahamsen dan Michael C. Williams, *Security Beyond the State: Private Security in International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 98.
Sidratahta Mukhtar, Laurencius Simanjuntak, Aly Ashghor

operasi penangkapan fisik dilakukan, ia secara tidak langsung mengakui adanya *Detournement de Pouvoir* (penyalahgunaan wewenang internasional).²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dakwaan *narco-terrorism* yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS tidak bekerja secara independen sebagai instrumen penegakan hukum pidana murni, melainkan berfungsi sebagai 'kendaraan politik-hukum' yang memfasilitasi tujuan geopolitik-ekonomi. Dalam model transaksional ini, status Maduro sebagai 'penjahat narkoba' dikonstruksi sedemikian rupa agar AS memiliki legitimasi moral dan hukum untuk menyita aset dan mengalihkan kendali ekonomi atas ladang minyak Orinoco tanpa harus melewati proses diplomasi yang berbelit.

Pergeseran dari Norm-Based ke Interest-Based Securitization

Sekuritisasi yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump dalam kasus ini menunjukkan anomali radikal dibanding pola historis kebijakan luar negeri AS. Keunikan pendekatan Trump terletak pada pengabaian atas 'retorika normatif' yang secara tradisional dijaga oleh para pendahulunya. Sebagai komparasi, pada invasi Irak tahun 2003, Washington berupaya keras mengemas motif geo-ekonomi di balik narasi senjata pemusnah massal dan demokratisasi. Sebaliknya, dalam kasus Venezuela tahun 2026, Trump mempraktikkan sekuritisasi yang bersifat langsung, vulgar, dan transaksional. Tindakan yang dilakukan Presiden Trump ini, berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam tata hukum keamanan global, di mana kedaulatan suatu negara dapat ditangguhkan (*suspended*) kapan saja ketika negara adidaya berhasil melegitimasi pelabelan kepala negara asing sebagai ancaman eksistensial.

Sifat transaksional tersebut menegaskan bahwa agenda keamanan tidak lagi murni berfokus pada perlindungan *referent object*—yakni proteksi publik

²⁸ Alexandre Kiss, "Abuse of Rights," dalam *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, terakhir diperbarui Desember 2006, Oxford Public International Law, <https://opil.ouplaw.com/>

domestik AS dari ancaman narkoba—melainkan pada pengamanan akses terhadap economic resource berupa komoditas minyak. Melalui pembingkaihan diskursif ini, audiens strategis yang disasar tidak hanya terbatas pada pemilih domestik, melainkan meluas ke aktor pasar, investor, serta korporasi energi multinasional yang berkepentingan terhadap restrukturisasi industri minyak Venezuela.²⁹

Secara yuridis, tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) berbasis sekuritisasi transaksional ini bertentangan secara diametral dengan prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) sebagaimana diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803.³⁰ Melalui intervensi ini, AS secara sepihak memosisikan diri sebagai otoritas yang berhak menentukan hak pengelolaan sumber daya alam di dalam wilayah kedaulatan negara lain.

Konvergensi politik-hukum ini memberikan konfirmasi empiris bahwa sekuritisasi dapat dimanipulasi sebagai instrumen 'privatisasi paksa' atas kekayaan negara berdaulat. Dengan menggeser status perselisihan dari ranah ekonomi-hukum pidana biasa ke ranah kedaruratan keamanan nasional (narco-terrorism), AS berhasil mengonstruksi *state of exception* (keadaan pengecualian). Kondisi darurat artifisial inilah yang memberikan pembenaran bagi Washington untuk mengesampingkan norma perlindungan kedaulatan dan batasan yurisdiksi yang berlaku dalam situasi normal.³¹

PENUTUP

Kesimpulan

Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada Januari 2026 tidak dapat dipahami semata sebagai praktik penegakan hukum pidana

²⁹ Donald Trump, "TRANSCRIPT: President Trump Discusses the Capture of Nicolás Maduro in Venezuela, 1.03.26," Senate Democratic Leadership, Newsroom, January 3, 2026, <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-discusses-the-capture-of-nicolas-maduro-in-venezuela-10326>.

³⁰ UN General Assembly, "Resolution 1803 (XVII): Permanent Sovereignty over Natural Resources," A/RES/1803(XVII) (14 Desember 1962).

³¹ Michael C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics," *International Studies Quarterly* 47, no. 4 (2003): 522.

Sidratahta Mukhtar, Laurencius Simanjuntak, Aly Ashghor

transnasional biasa, melainkan harus dibaca sebagai manifestasi konkret dari sekuritisasi energi yang dikonstruksi secara strategis melalui narasi *narco-terrorism*. Operasi militer yang berujung pada ekstradisi paksa ke yurisdiksi Amerika Serikat menunjukkan bagaimana isu komoditas ekonomi yang bernilai geopolitik tinggi—yaitu minyak—didefinisikan ulang sebagai ancaman keamanan nasional yang eksistensial melalui mekanisme *speech act*. Pergeseran dari ranah politik normal menuju ranah politik kedaruratan inilah yang kemudian melahirkan pembenaran atas penggunaan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*), termasuk intervensi militer unilateral dan pengabaian prinsip imunitas kepala negara aktif (*head-of-state immunity*).

Kasus ini mengonfirmasi adanya anomali radikal dalam studi keamanan kontemporer melalui konsep sekuritisasi transaksional (*transactional securitization*). Gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump secara transparan menepis 'retorika normatif' konvensional dan secara terbuka mengaitkan pembiayaan instrumen keamanan dengan keuntungan komersial yang nyata atas ladang minyak Venezuela. Pendekatan ekstraktif ini membawa implikasi serius terhadap tatanan hukum internasional karena berpotensi merusak prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) dan menciptakan preseden manipulasi hukum berupa penyalahgunaan wewenang internasional (*détournement de pouvoir*). Pada akhirnya, kasus Venezuela menjadi refleksi kritis bahwa arsitektur hukum internasional rentan direkonstruksi menjadi instrumen pragmatis oleh aktor kekuasaan dominan untuk mengesampingkan norma kedaulatan dalam situasi damai demi memfasilitasi agenda geo-ekonomi.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup pada analisis diskursus dan legalitas formal di sekitar waktu peristiwa penangkapan pada awal tahun 2026. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti akademis selanjutnya untuk memperluas kajian pada analisis dampak empiris jangka panjang dari preseden ini, baik terhadap stabilitas arsitektur keamanan di kawasan Amerika Latin maupun terhadap kepatuhan negara-negara besar terhadap yurisdiksi Mahkamah

Internasional (ICJ). Selain itu, studi lanjutan dapat menguji efektivitas konsep transactional securitization ini jika diterapkan pada kasus-kasus sengketa sumber daya strategis lainnya di tingkat global.

Secara rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*), rezim hukum internasional—khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—perlu merumuskan mekanisme pengawasan yurisdiksi ekstrateritorial yang lebih ketat guna membentengi prinsip kedaulatan negara berdaulat dari penetrasi agenda politik-keamanan unilateral. Komunitas internasional juga harus memperkuat kodifikasi norma proteksi ekonomi global agar sengketa tata kelola sumber daya domestik suatu negara tidak dapat dimanipulasi secara sepihak menjadi dalih kedaruratan keamanan nasional oleh negara adidaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsen, Rita, dan Michael C. Williams. *Security Beyond the State: Private Security in International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Alghifari, M. "Juridical Analysis of Humanitarian Intervention and State Sovereignty." *Journal of Law & Development* 50, no. 1 (2020): 21–35.
- Anghie, Antony. *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Avcioglu, Mucahithan. "Global Energy Giants Gunning for Venezuela's Resources." *Anadolu Ajansı*, January 7, 2026. <https://www.aa.com.tr/en/economy/explainer-global-energy-giants-gunning-for-venezuela-s-resources/3792648>.
- Bimantara, Azza. "AS vs Venezuela, Akademisi UMM: Konflik Geopolitik Kepentingan Ekonomi dan Energi." Universitas Muhammadiyah Malang, January 19, 2026. <https://umm.ac.id/as-vs-venezuela-akademisi-umm-konflik-geopolitik-kepentingan-ekonomi-dan-energi/>
- Balzacq, Thierry. "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context." *European Journal of International Relations* 11, no. 2 (2005): 171–201.

- Budiman, Imam. "Teori Sekuritisasi dalam Studi Keamanan Nasional." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2013): 101–115.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.
- Cano, Regina Garcia, dan Konstantin Toropin. "US Strikes Venezuela, Says Nicolás Maduro Has Been Captured." *Military Times*, January 3, 2026. <https://www.militarytimes.com/news/your-military/2026/01/03/us-strikes-venezuela-says-Nicolás-maduro-has-been-captured/>
- Firdaus, Faradilla. "Strategi Perlawanan Venezuela dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga* 12, no. 1 (2019).
- Floyd, Lauren. "Maduro Indictment Unsealed after U.S. Capture in Venezuela." *Axios*, January 3, 2026. <https://www.axios.com/2026/01/03/indictment-trump-maduro-capture-venezuela>
- Grobe, Stefan. "Trump Administration Says It Will Run Venezuela Temporarily after Maduro Arrest." *Euronews*, January 3, 2026. <https://www.euronews.com/2026/01/03/after-maduros-arrest-trump-wants-to-run-venezuela-for-now>
- Harb, Ali. "Abduction of Venezuela's Maduro Illegal despite US Charges, Experts Say." *Al Jazeera*, January 8, 2026. <https://www.aljazeera.com/news/2026/1/8/abduction-of-venezuela-s-maduro-illegal-despite-us-charges-experts-say>
- Iskandar, Fathur Octaviano. "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Krisis Venezuela pada Masa Nicolás Maduro." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2021).
- Kiss, Alexandre. "Abuse of Rights." Dalam *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Terakhir diperbarui Desember 2006. Oxford Public International Law.

- Mommer, Bernard. "The Value of Extra-Heavy Crude Oil from the Orinoco Belt." *Middle East Economic Survey* 47, no. 11 (March 15, 2004).
- Pratama, R. "Imunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional dan Domestik Negara Lain." *Jurnal Hukum Internasional UNPAD* 4, no. 3 (2021).
- Purwati, Ani. 2026. "Extraterritorial Jurisdiction and Head-of-State Immunity: Sovereignty and the Use of Force in the Fragmentation of International Law". *International Journal of Science and Environment (IJSE)* 6 (1):334-42. <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.330>.
- The Straits Times. "How Venezuelan Oil Factored into the US Capture of Maduro." January 4, 2026. <https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/how-venezuelan-oil-factored-into-the-us-seizure-of-maduro>
- Trump, Donald. "TRANSCRIPT: President Trump Discusses the Capture of Nicolás Maduro in Venezuela, 1.03.26." Senate Democratic Leadership, Newsroom. January 3, 2026. <https://www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-discusses-the-capture-of-nicolas-maduro-in-venezuela-10326>.
- UN General Assembly. "Resolution 1803 (XVII): Permanent Sovereignty over Natural Resources." A/RES/1803(XVII). 14 Desember 1962.
- U.S. Department of Justice. "Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges against Nicolás Maduro, Current and Former Venezuelan Officials, and FARC Leadership." Press release, March 26, 2020. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-narco-terrorism-charges-against-Nicolás-maduro-current>
- . "Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges." Press release, March 26, 2020 (updated February 5, 2025). <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>

- U.S. Customs and Border Protection. "Frontline Against Fentanyl." Last modified May 7, 2026. <https://www.cbp.gov/border-security/frontline-against-fentanyl>
- Williams, Michael C. "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics." *International Studies Quarterly* 47, no. 4 (December 2003): 511–31. <https://doi.org/10.1046/j.0020-8833.2003.00277.x>.
- Worldometer. "Minyak Venezuela." Accessed February 7, 2026. <https://www.worldometers.info/id/minyak/minyak-venezuela/>